

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2004-2014**



SKRIPSI

OLEH:

DIAN PUTRI ARDIANA

13810179

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2004-2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

DIAN PUTRI ARDIANA

13810179

**PEMBIMBING:
SUNARYATI, SE, M.Si**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan suatu wilayah akan menyebabkan instabilitas sosial, ketidakpastian, dan rendahnya kesejahteraan yang akan mengganggu stabilitas perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi daerah di Prov. Jawa Tengah yang diindikasi oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2004-2014 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari Rp. 193.435.263,05 juta rupiah di tahun 2004 menjadi Rp. 925.662.692,00 juta rupiah di tahun 2014. Hal ini dikarenakan konsentrasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kegiatan ekonomi masing-masing wilayah. Sedangkan tingkat kemiskinan di Prov. Jawa Tengah diindikasi oleh banyaknya jumlah penduduk miskin pada tahun 2004-2014 yang menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 6.843,8 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi sebanyak 4.561,82 juta jiwa di tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Prov. Jawa Tengah pada periode 2004-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat statistic Prov. Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel analisis *random effect model*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada periode tahun 2004 hingga tahun 2014 variabel PDRB dan Indeks Gini secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan negatif. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 35%. Artinya bahwa variabel independen (PDRB dan Indeks Gini) mampu menjelaskan variabel dependen (jumlah penduduk miskin) sebesar 35%, sedangkan 65% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

Keyword: *pertumbuhan ekonomi, PDRB, kemiskinan, Indeks Gini*

ABSTRACT

Poverty and unequal distribution of regional income will be lead to social instability, uncertainty, and welfare that would destabilize of the macro economy. Regional economic growth in Prov. Central Java which is indicated by the value of GDP at current prices in the years 2004-2014 showed an increasing trend, from Rp. 193,435,263.05 million in 2004 to Rp. 925,662,692.00 million in 2014. This is happen because of the concentration of local governments in an effort to increase the economic growth of a sector of economic activity of each region. While the level of poverty in Prov. Central Java, indicated by the number of poor people in the year 2004-2014 which showed a declining trend, from 6843.8 million in 2004 to as much as 4561.82 million in 2014.

This study aimed to analyze the influence of regional economic growth and unequal distribution of income to the level of poverty in Prov. Central Java in the period 2004-2014. The data used in this research is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics Prov. Central Java. The method used in this study using panel data regression analysis of random effect model.

The results showed that in the period 2004 to 2014 the GDP and Gini index variables jointly significant and negative effect. The coefficient of determination obtained by 35%. This means that the independent variable (PDRB and Gini index) is able to explain the dependent variable (the number) by 35%, while 65% is explained by variables outside the model.

Keyword: *economic growth, PDRB, poverty, Gini Index*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Dian Putri Ardiana

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Dian Putri Ardiana
NIM	:	13810179
Judul Skripsi	:	"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2014"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Jumadil Awwal H
14 Februari 2017 M

Pembimbing

Sunaryati, S.E., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474, Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B – 918 / Un.02 / DEB / PP.05.3/03/2017

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS PENGARUH
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE 2004-2014

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dian Putri Ardiana
NIM : 13810179
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai Munaqasyah : A- (93)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR :

Ketua Sidang

Sunaryati, S.E., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

Pengaji I

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
NIP. 19710423 199903 1 001

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 6 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Putri Ardiana

NIM : 13810179

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2014” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Memberi Pernyataan



Dian Putri Ardiana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Putri Ardiana
NIM : 13810179
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti
Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang
berjudul:

**“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2014”**

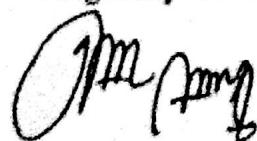
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak
menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 14 Februari 2017

Yang menyatakan



(Dian Putri Ardiana)

HALAMAN MOTTO

“Ideas won’t keep! Something must be done about them”

- Alferd North Whitehead -

..... وَأَنْ لَا تَعْلُوَا عَلَى اللَّهِ

“Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah.....”

(Q.S. Ad-Dukhaan : 19)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada (Alm)
Ayahanda, Ibunda, adik-adik tercinta, serta almamaterku
tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penyusun, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amin.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan liku-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan melakukan penelitian.

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pembimbing materi maupun teknis. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda (Alm) Pardiyanto dan Ibunda Ratmini serta adik-adikku Damar Ardian Saputra dan Anita Isgi Nugrahini yang selalu memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.

4. Ibu Sunaryati, S.E., M.SI. selaku Kaprodi Ekonomi Syari"ah sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
5. Teman-teman KKN angkatan ke-89, Teti, Nurul, Ega, Heni, Iwan, Wafi, Luthfi, dan Said yang telah banyak memberi pelajaran hidup bagi penulis.
6. Teman-teman Gardep 53 dan Team Oblong Trainning XVII, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan keceriaan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Nabila, Nia, Ufiya dan Annisa yang selalu tak kenal lelah memberi semangat, menemani dan membimbing dengan penuh ikhlas dan kesabaran kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin Ya Rabbal, Alamiin

Wassalamu "alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penyusun

Dian Putri Ardiana
NIM. 13810179

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Bā'	b	be
تَ	Tā'	t	te
سَ	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jīm	j	je
هَ	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Khā'	kh	ka dan ha
دَ	Dāl	d	de
ذَ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
رَ	Rā'	r	er
زَ	Zāi	z	zet
سَ	Sīn	s	es
شَ	Syīn	sy	es dan ye
صَ	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ضَ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	Ditulis	Muta ‘addidah ‘iddah
------------------	---------	-------------------------

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah
------	---------	--------

عَلَّة كرامة الأولياء	ditulis	‘illah <i>karāmah al-auliyā’</i>
---------------------------------	---------	-------------------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---́---	Fathah	ditulis	A
---ׁ---	Kasrah	ditulis	i
---ׁ́---	Dammah	ditulis	u

فَعْل ذَكْر يَذْهَب	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa ‘ala</i> <i>žukira</i> <i>yažhabu</i>
--	----------------------------	-------------------------------	---

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنْسِي	ditulis	ā <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بِينَمَّ	ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرْوَضْ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4 Telaah Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	15
2.1.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik	16
2.1.2 Disparitas Antar Wilayah	17
2.2 Kemiskinan	18
2.2.1 Ciri-ciri Masyarakat Miskin	19
2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	20

2.2.3 Mengukur Kemiskinan	21
2.2.4 Macam-macam Kemiskinan	21
2.2.5 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam	23
2.3 Ketimpangan Pendapatan	26
2.3.1 Kurva Lorenz	27
2.3.2 Indeks Gini	28
2.3.3 Indeks Williamson	29
2.3.4 Hipotesis Kuznet	31
2.3.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Pandangan Islam..	32
2.4 Hipotesis <i>Trickle Down Effect</i>	34
2.5 <i>Pro Poor Growth Index (PPGI)</i>	36
2.6 Kerangka Pemikiran	36
2.7 Hipotesis Penelitian	37
2.7.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	38
2.7.2 Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dengan Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	40
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Definisi Operasional Variabel	41
3.3.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	41
3.3.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	42
3.4 Data dan sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6 Metode Analisis	45
3.6.1 <i>Pooled Least Square (PLS)</i>	48
3.6.2 <i>Fixed Effect</i>	49
3.6.3 <i>Random Effect</i>	49
3.7 Teknik Analisis Data	49

3.7.1 Uji Statistik F (Uji Chow)	50
3.7.2 Uji Hausman	51
3.7.3 Uji Lagrange Multiplier	51
3.7.4 Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Kondisi Wilayah	56
4.1.1 Kondisi Kependudukan	56
4.1.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi	57
4.1.3 Kondisi Kemiskinan	59
4.2 Analisis Ketimpangan	60
4.2.1 Analisis Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	60
4.3 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan	62
4.3.1 Analisis	62
4.3.2 Pengujian Hipotesis	64
4.3.3 Analisis Regresi Berganda	67
4.3.4 Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	68
4.4 Analisis Pro Poor Growth Indeks	70
4.5 Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Yang Diterapkan	71
4.6 Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Th 2008-2012	3
Tabel 1.2 Kontribusi Komponen Sisi Penggunaan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008-2012	4
Tabel 1.3 Pengeluaran Per Kapita tiap bulan Daerah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2005-2014	5
Tabel 1.4 Prosentase dan jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah 2008-2013	6
Tabel 1.5 Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah 2008-2012 (Desa dan Kota)	7
Tabel 4.1 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2014	61
Tabel 4.2 Analisis Regresi Pengaruh PDRB Dan Indeks Gini Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2014	62
Tabel 4.3 Hasil Pengujian F Test (Chow Test)	63
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Hausman Test	64
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Hipotesis Uji F	65
Tabel 4.6 Nilai Koefisiensi Determinasi	66
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Individu (Uji T)	67
Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda Pengaruh PDRB dan GINI Terhadap jumlah Penduduk Miskin Menggunakan Eviews 8	67
Tabel 4.9 Penghitungan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Netto Terhadap Kemiskinan	69
Data Penelitian Jumlah Penduduk Wilayah Jawa Tengah 2004-2014	107
Data Penelitian PDRB Wilayah Jawa Tengah 2004-2014	109
Data Penelitian Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Jawa Tengah 2004-2014..	111
Data Penelitian Gini Rasio Wilayah Jawa Tengah 2004-2015	113
Data Penelitian Regresi Data Panel Kemiskinan	114
Uji Spesifikasi Model	129
Hasil Output	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz	28
Gambar 2.2 Kurva Kuznet	32
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	37
Gambar 4.1 Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2014	57
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2014 (dalam jutaan rupiah)	58
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2014 (dalam ribuan jiwa)	59
Histogram Normality	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka kemiskinan di Indonesia sempat meningkat selama masa krisis ekonomi yaitu sebesar 23% atau lebih pada tahun 1999. Kunci dari pemulihan setelah masa krisis tersebut terletak pada stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan tahun 2001 dan penurunan harga barang, terutama beras yang penting untuk konsumsi masyarakat miskin sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Akan tetapi, walaupun ada penurunan angka kemiskinan secara terus menerus, belum lama ini terjadi kenaikan angka kemiskinan yang tak terduga. Penyebab utama terjadinya perubahan tersebut diperkirakan adalah melonjaknya harga beras yang diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 33% dari harga beras yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin antara bulan Februari 2005 dan Maret 2006, dan sebagian besar hal tersebut mampu menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin menjadi 17,75%. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi dalam pendapatan akan menyebabkan instabilitas sosial, ketidakpastian, dan hal buruk lainnya seperti kelaparan, gizi buruk, dan tingkat kesehatan yang rendah. Hal-hal tersebut tentu akan mengganggu stabilitas perekonomian makro yang ada di suatu pemerintahan, baik itu daerah maupun pusat (SKPD Prov. Jawa Tengah 2011-2013).

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang

disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 (The World Bank Office Jakarta: 2006).

Berbagai tindakan diperlukan di beberapa bidang untuk menangani empat butir penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu; mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, memperkuat kemampuan sumber daya manusia, mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan juga memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik yang lebih memihak masyarakat miskin.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten yang terdiri atas Kabupaten Batang, Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sukoharjo, Sragen, Semarang, Temanggung, Tegal, Wonosobo, dan Wonogiri. Serta 6 kota yaitu Kota Magelang, Surakarta, Semarang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal.

Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia dengan rata-rata kepadatan

penduduknya mencapai 995 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah tersebut mampu menempatkan Provinsi Jawa Tengah di posisi ke tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara proporsional jumlah penduduk terbesarnya adalah penduduk usia produktif atau kelompok umur angkatan kerja (15-64 tahun), dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah pencari kerja, angka pengangguran dan kebutuhan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan kerja cukup tinggi. Apabila dilihat dari jenis pekerjaan penduduk, jumlah pekerja pada lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDB daerah masing-masing dan dari laju pertumbuhan atas harga konstan (Shandika, 2012: 6). Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif baik dan stabil. Pada Tahun 2012 dari keenam provinsi di Pulau Jawa, terdapat tiga provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,23%, dimana tiga provinsi tersebut ditempati oleh Provinsi Jawa Timur 7,27%, DKI Jakarta 6,53% dan Jawa Tengah 6,34%.

Tabel 1.1
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2012 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2000
2008	11.406.655	5.220.713
2009	12.322.889	5.471.490
2010	13.730.016	5.773.809
2011*)	15.380.771	6.114.211
2012**)	17.140.206	6.494.368

Sumber : BPS (PDRB Jateng 2012)
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun disamping adanya peningkatan PDB daerah, Provinsi Jawa Tengah masih memiliki permasalahan mengenai tingginya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya pengangguran, sehingga jumlah penduduk miskin juga masih tergolong tinggi.

Tabel 1.2
Kontribusi Komponen Sisi Penggunaan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

No	Jenis Penggunaan	PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku				
		2008	2009	2010^{r)}	2011^{*)}	2012^{**}
1	Konsumsi Rumah Tangga	63,16	64,44	64,21	64,24	63,95
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,45	1,52	1,43	1,39	1,43
3	Konsumsi Pemerintah	11,44	12,11	11,35	11,25	11,06
4	PMTB	18,60	19,45	19,19	18,47	19,63
5	Perubahan Stock	5,62	0,03	(0,50)	3,02	1,21
6	Ekspo	49,61	44,66	45,15	44,69	46,80
7	Impor	49,90	42,21	40,83	43,06	44,08
	PDRB Penggunaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

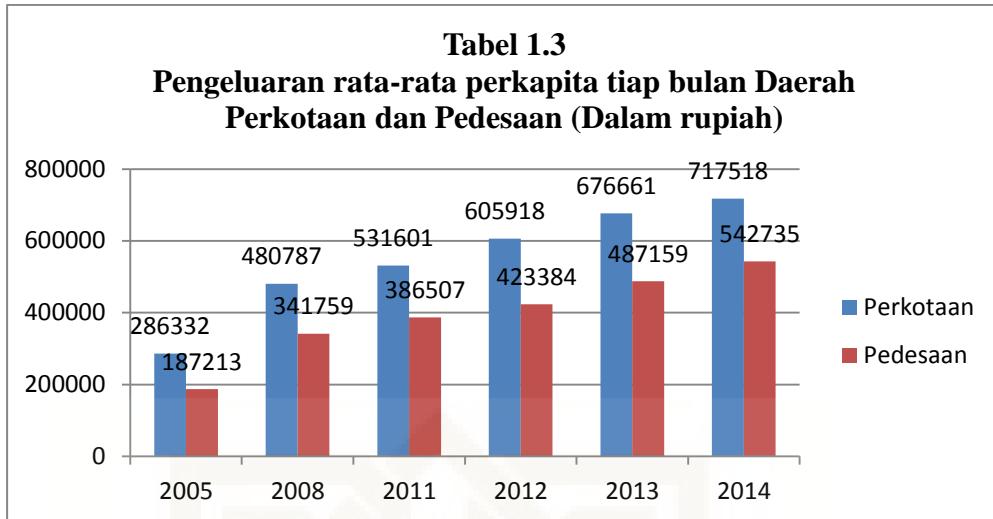
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (PDRB Jateng 2010, 2011, 2012)

Keterangan: r) angka revisi

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB Jawa Tengah ketika dilihat dari sisi penggunaan menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah. Besaran nilai komponen PDRB dari sisi penggunaan juga meningkat terus menerus dari tahun ke tahun selama 2008-2012 (RPJMD Jawa Tengah 2013-2018: 2014)



Sumber: *Jawa Tengah Dalam Angka (tahun 2005-2014)* data diolah.

Ketika saya melihat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2014 tercatat sebesar 622.904 rupiah. Rata-rata pengeluaran di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yakni sebesar 717.518 rupiah, berbanding 542.735 rupiah. Dengan kata lain rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di perdesaan hanya 75,64% dari pengeluaran di daerah perkotaan. Hal tersebut sudah mampu memberikan gambaran betapa tidak simbangnya distribusi pendapatan yang ada, hal baru dilihat dari sisi konsumsi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2010 ditetapkan oleh BPS sebesar Rp 192.435,- per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan dari 20,49% menjadi 22,19%, hal tersebut dikarenakan pada saat itu terjadi kenaikan bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Pada tahun 2009 angka angka kemiskinan sebesar 5,72 juta jiwa (17,72 %), namun selama tahun 2010 mampu mengalami penurunan menjadi sebanyak

5,37 juta jiwa (16,56 %) pada bulan Maret tahun 2010, sebanyak 5,22 juta jiwa (16,11 %) pada bulan Juli 2010, dan menjadi sebanyak 5,10 juta jiwa (15,76 %) pada bulan Maret 2011. Meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah telah mengalami penurunan namun pada hakikatnya jumlahnya masih relatif tinggi, hal ini mengharuskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kerja keras dan keseriusan dari seluruh pihak yang kepentingan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen masyarakat yang ada.

Data terakhir BPS telah menunjukkan adanya perbaikan dari jumlah kemiskinan di bulan September 2013. Tingkat kemiskinan di bulan tersebut sebesar 4.705 ribu jiwa atau 14,44% dari jumlah penduduk di Jawa Tengah, dan lebih rendah dibanding bulan Maret 2013 yang sebesar 4.733 ribu jiwa. Sementara secara persentase, jumlah penduduk miskin tersebut menurun 0,59% dibanding bulan Maret 2013 atau menurun 0,03% dibanding bulan yang sama tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir terbilang cukup efektif.

**Tabel 1.4
Prosentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah 2008-2013**

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Prosentase (%)
2008	6.112,60	18,99
2009	5.655,40	17,48
2010	5.217,20	16,11
2011	5.255,96	16,21
2012	4.863,40	14,98
2013	4.705,00	14,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2013 data diolah.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 0,04% atau menurun 2,12% dibandingkan Maret 2013. Sementara di pedesaan, secara tahunan penduduk miskin menurun sebesar 0,03%. Sebaliknya bila dibandingkan bulan Maret 2013, angka kemiskinan di desa terlihat meningkat. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2013 mencapai 1.871 ribu jiwa. Sedangkan di pedesaan mencapai 2.834 ribu jiwa atau memiliki porsi 60% dari total penduduk miskin di Jawa Tengah.

Tabel 1.5
Prosentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Tengah 2008-2012
(Dalam ribu jiwa)

Tahun	Kota	%	Desa	%
2008	2.556,50	16,34	3.633,10	21,96
2009	2.420,90	15,41	3.304,80	19,89
2010	2.258,94	14,33	3.110,22	18,66
2011	2.175,82	14,67	3.080,17	17,50
2012	1.946,51	13,11	2.916,90	16,55
2013	1.871	13,07	2.834	14,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2013 data diolah

Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global dan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan target *Millenium Development Goals* (RAD-MDGs) Tahun 2011-2015, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010-2020, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Di dalam Islam, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan juga menjadi hal penting yang sangat diperhatikan. Seperti yang

tercantum dalam Q.S Al-Kahfi ayat ke 79 yang menggambarkan sebagai berikut:

اما السفينة فكانت لمسكين يعملون فى البحر فاردت ان اعييها و كان وراءهم

ملك يأخذ كل سفينة غصباً (Q.S. Al-kahfi: 79)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa orang-orang miskin bukan ditentukan oleh ketiadaan atau kekurangan harta benda yang mereka miliki, akan tetapi lebih ditentukan oleh kelemahan atau ketiadaan potensi mereka untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidup.

ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف (Q.S. Al-nisa:6)

Sedangkan untuk kemerataan distribusi pendapatan Allah memberikan penjelasan melalui Q.S Al-Nisa ayat 6 sebagaimana tersebut dimana orang kaya diperintahkan untuk menahan diri dari memakan harta benda anak yatim, sedangkan untuk orang fakir diberikan toleransi dengan catatan hal tersebut dilakukan dengan pantas (*ma'ruf*).

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa kendala dan kebijakan untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Karena pengentasan kemiskinan sendiri merupakan masalah sosial ekonomi yang sangat kompleks dan menjadi proyek nasional yang harus ditangani oleh setiap daerah. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana suatu daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya namun juga mampu menangani atau bahkan mengurangi masalah kemiskinan dan beberapa faktor

lainnya yang saling berpengaruh di masing-masing daerah. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian “**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2004-2014**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena adanya peningkatan input dalam komponen pendapatan. Selain adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki angka kemiskinan yang terus menurun dari tahun ke tahun. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota dengan PDRB yang berbeda di setiap kabupaten/kota dan beragam. Perbedaan PDRB antar daerah disebabkan adanya perbedaan potensi dan struktural ekonomi di setiap daerah. Dengan adanya perbedaan potensi dan struktural ekonomi antar kabupaten/kota tersebut dapat memiliki peluang atau kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Sehingga dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan memungkinkan terdapat ketimpangan distribusi di dalamnya. Pada saat inilah seharusnya pemerintah mampu melakukan upaya-

upaya dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan tersebut, sehingga pengentasan kemiskinan dapat merata ke seluruh daerah.

Dari latar belakang tersebut maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a. Bagaimanakah pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
- b. Bagaimanakah pengaruh variabel ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian dalam analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan ini adalah:

- a. Mengetahui hubungan variabel ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti: penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan mengenai studi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah pengalaman di bidang penelitian.

- b. Bagi pemerintah: penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi instansi pemerintah untuk dapat meninjau ulang keefektifan kebijakan yang telah dilakukan guna mengatasi kemiskinan. Dan melakukan optimalisasi kebijakan yang dapat lebih berpengaruh dan mampu dalam mengatasi kemiskinan.
- c. Bagi khasanah ilmu pengetahuan: penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam wacana pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan tambahan ruang dalam penelitian mengenai kemiskinan antar kabupaten/kota.

1.4 Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan sudah menjadi pembahasan umum di kalangan peneliti. Karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan kompleks yang sudah menjadi perbincangan lama, namun hingga saat ini masih belum ditemukan solusi yang paling tepat dalam menanganinya. Widya Puspita Ayu (2008) melakukan penelitian tentang Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004. Penelitian yang dilakukannya menggunakan model tipologi klassen, LQ, dan Indeks Williamson. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi struktural dan potensi ekonomi suatu daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tutik Yuliani (2015) melakukan penelitian Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur

menggunakan hipotesis Kuznet dan analisis korelasi Pearson. Hasil penelitian yang dia peroleh menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografis mengakibatkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Linggar dan Achma Hendra juga melakukan penelitian mengenai Analisis Pengarung Ketimpangan Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Periode 2000-2007 menggunakan metode analisis regresi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang positif terhadap angka kemiskinan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengacu pada penelitian dari Pendi Dewanto, Rujiman, dan Agus Suriadi dalam Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro. Terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan Indeks Gini, PPGI dan Analisis Regresi data panel. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada pengurangan penggunaan indeks entropi theil dan penggunaan periode penelitian diambil pada tahun 2004-2014. Objek penelitian dikakukan di 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah.

No.	Penulis dan Tahun	Sumber Referensi	Judul	Variabel & Alat Analisis	Ringkasan Hasil
1	Widya Puspita Ayu Tahun 2008	Skripsi	“Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004.”	Variabel: PDRB, PDRB perkapita, Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan ekonomi. Alat analisis: Tipologi Klassen, LQ, Shift share, Indeks Williamson, Indeks Theil.	1. Hasil dari Tipologi Klassen adalah terdapat 4 kuadran kecamatan. 2. Nilai rata-rata indeks Williamson kabupaten Semarang adalah 0,533, sedangkan nilai rata-rata indeks entropy Theil sebesar 18,344. 3. LQ tiap kecamatan di Kabupaten Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sektor industry merupakan sektor basis di empat kecamatan saja, dari 17 kecamatan di Kabupaten Semarang. 4. Hasil Analisis Shift Share diketahui terdapat 6 sektor yang mempunyai nilai $Pj>0$ merata, sektor tersebut adalah sector industri, sektor, listrik, gas dan air, sector bangunan, sektor angkutan, dan sektor jasa
2	Tutik Yuliani Tahun 2015	Jurnal	“Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur”	Variabel: PDRB perkapita, PDRB rata-rata, Jumlah penduduk di kabupaten/kota, Jumlah penduduk di Provinsi. Alat analisis: Indeks Entropi Theil, Indeks Williamson, hipotesis Kuznet (kurva U), Analisis Korelasi Pearson.	1. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah. 2. Distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ketahun. Namun, nilai indeks masih berada di atas 0 3. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai korelasi negatif sebesar -0,333 apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka terdapat ketimpangan pembangunan.
3	Linggar Dewangga Putra & Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si	Jurnal	“Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007”	Variabel: Jumlah penduduk miskin, Indeks Gini, PDRB perkapita, Jumlah penduduk. Alat analisis: Indeks Williamson, Analisis Regresi.	1. Variabel indeks gini dan indeks Williamson berpengaruh signifikan dan juga mampu menerangkan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. 2. Indeks Gini dan Indeks Williamson menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah.
4	Pendi Dewanto, Rujiman, dan Agus Suriadi.	Jurnal	“ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan	Variabel: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, jumlah	1. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kawasan Mebidangro berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengaruh ketimpangan

			Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro”	penduduk, PDRB. Alat analisis: Indeks <i>Gini</i> , Indeks <i>Theil</i> , <i>Pro Poor Growth Index (PPGI)</i> , Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Data Panel.	pendapatan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro selama tahun 2004-2011 bersifat tidak pro kemiskinan (<i>anti poor</i>) yang ditandai dengan angka indeks <i>pro-poor growth</i> sebesar -7,824. 3. Sektor-sektor yang berpengaruh dominan dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor angkutan dan komunikasi.
5	Frenky Parama Putra Tahun 2014	Skripsi	“Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkecamatan Di Kabupaten Bekasi, 2003-2011”	Variabel: PDRB, PDRB perkapita, Jumlah penduduk. Alat analisis: Tipologi Klassen, Indeks Entropi Theil dan Indeks Jaime Bonet.	1. Hasil analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Bekasi dibagi menjadi empat kategori daerah yaitu; cepat maju & cepat tumbuh, maju tapi tertekan, berkembang cepat, dan relatif tertinggal. 2. Ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Bekasi yaitu rata-rata 0,30685 untuk Indeks Entropi Theil. 3. Indeks Jaime Bonet Kabupaten Bekasi terdapat tiga daerah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah hingga tinggi.
6	Hestiani Tahun 2015	Skripsi	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2013”	Variabel: PDRB, PDRB perkapita, Jumlah penduduk. Alat analisis: Indeks Williamson, regresi data panel dengan <i>Fixed Effect</i> dan Tipologi Klassen.	Nilai rata-rata indeks Williamson relatif tinggi yaitu sebesar 0.44. Menunjukkan distribusi pendapatan di provinsi DIY timpang dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil estimasi dengan model <i>Fixed Effect</i> diketahui bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran pemerintah. Sedangkan berdasarkan analisis tipologi Klassen diketahui bahwa Kota Yogyakarta termasuk klasifikasi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisiensi sebesar 301463,3.
- b. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisiensi sebesar 0,000707.

5.2. Saran

- a. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pembaharuan data yang lebih teratur.
- b. Diharapkan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan guna mendukung program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah, 2013, *Al-Qur'an Keluarga Edisi Mawaddah*, Jawa Timur: Halim Publishing and Distributing

Jurnal

Anton Tri Wijayanto, 2016, "Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Prov. Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 1.

Arius Jonaidi, 2012, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 1.

Bambang Prishardoyo, 2008, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Pati Tahun 2002-2005", *JEJAK*, Vol. 1, No. 1.

Daniel Judah Sumbayak, dkk, 2015, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan", *VIBIZ Regional Research: Universitas Indonesia*, Februari

Erry Gogy dan Sugeng Hadi Utomo, 2012, "Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2005-2009", *JESP*, Vol. 4, No. 1.

Henny A.K. Pangkiro dkk, 2016, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 1.

Nurnasrina, 2013, "Ekonomi Islam Sarana Dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 13, No. 1.

Pendi Dewanto, dkk, 2014, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kawasan MEBIDANGRO", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 3.

Buku

Ahmad Izzan, 2006, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : BP STIE YKPN.

Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelimaa. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Hajiji, Ajid. 2010. Pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002-2008 [Tesis]: Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Diterjemahkan oleh D. Guritno Edisi Keenambelas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Mankiw, 2000, *Macro Economics Fourth Eurton*, Worth Publish, United State of America.

Michael Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, Edisi Ketujuh Penerjemah : Harris Munandar.

Mudrajad Kuncoro, 2000, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan. 2010. *Ekonometrika Pengantar*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Tambunan, Tulus, 2009, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umer Chapra, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Usman H & R. Purnomo Setiadi Akbar, 2000, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wodon QT, 1999, *Growth, Poverty and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh Policy Research Working Paper 2072*, Washington: World Bank.

Skripsi

Eko Wicaksono Pambusi, 2013, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi (Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Hanifa Tsany Hasna, 2015, “Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.

Linggar Dewangga Putra, 2011, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Prov. Jawa Tengah Periode 2000-2007”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi.

Restuty Anggereny Rumahorbo, 2014, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Susi Roria Sari, 2014, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan jumlah Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Vendi Wijanarko, 2013, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan JELBUK Kab. Jember”, *Skripsi*, Universitas Jember, Fakultas Ekonomi.

Input Data

Badan Pusat Statistik, 2010, *Data Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2002-2009*, BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2013, *Data Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2009-2013*, BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2015, *Angka Kemiskinan Wilayah Jawa Tengah Periode 2004-2014*, BPS Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik, 2015, *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa) Wilayah Jawa Tengah Periode 2004-2014*, BPS Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2015, *Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) Wilayah Jawa Tengah*, BPS Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2015, *Data Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2010-2014*, BPS Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik, 2015, *Gini Rasio Wilayah Jawa Tengah Periode 2004-2014*, BPS Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik, 2015, *Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Antar Provinsi di Indonesia Atas Harga Berlaku 2004-2014*, BPS Pusat.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2005. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2006. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2007. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2010. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2011. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2013. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS. Propinsi Jawa Tengah.

Publikasi Pemerintah

Badan Pusat Statistik, 2016, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, BPS Pusat.

Badan Pusat Statistik, 2016, *Pofil Kemiskinan di Jawa Tengah*, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 05/01/33/Th. X.

Bank Indonesia, 2013, *Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah Triwulan I 2013*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V (Jateng-DIY)

Indonesia Expanding Horizons, *Mengurangi kemiskinan*, Bank Dunia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2011, *Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2011, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Spkd) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014, *Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 29 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014, *Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Halaman	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1.	10	Q.S. Al-Kahfi : 79	<i>Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.</i>
2.	10	Q.S. Al-Nisa : 6	<i>Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).</i>
3.	26	Q.S. Al-Ra'd : 26	<i>Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).</i>
4.	27	Q.S. Al-Taubah : 105	<i>Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.</i>
5.	34	Q.S. Al-A'raf : 31	<i>Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.</i>
6.	34	Q.S. Al-Isra' : 29	<i>Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.</i>

LAMPIRAN II

Data Penelitian Jumlah Penduduk (jiwa) Wilayah Jawa Tengah

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINSI JAWA TENGAH	32,397,431	32,908,850	32,177,730	32,380,279	32,626,390	32,864,563	32,443,886	32,725,378	32,998,692	33,264,339	33,522,663
Kabupaten Cilacap	1,654,971	1,674,210	1,621,664	1,623,176	1,626,795	1,629,908	1,644,927	1,655,796	1,666,163	1,676,089	1,685,573
Kabupaten Banyumas	1,514,105	1,531,737	1,490,665	1,495,981	1,503,262	1,510,102	1,557,667	1,574,001	1,590,011	1,605,579	1,620,918
Kabupaten Purbalingga	854,924	863,478	816,720	821,870	828,125	834,164	850,774	860,596	870,276	879,880	889,214
Kabupaten Banjarnegara	891,964	903,919	859,668	864,148	869,777	875,167	870,503	877,207	883,694	889,921	895,986
Kabupaten Kebumen	1,200,724	1,208,486	1,203,230	1,208,716	1,215,801	1,222,542	1,161,706	1,167,092	1,172,036	1,176,722	1,181,006
Kabupaten Purworejo	709,878	712,003	717,439	719,396	722,293	724,973	696,525	699,718	702,699	705,483	708,038
Kabupaten Wonosobo	769,138	779,919	752,136	754,447	757,746	760,819	756,094	760,765	765,189	769,318	773,280
Kabupaten Magelang	1,154,862	1,169,638	1,153,234	1,161,278	1,170,894	1,180,217	1,184,091	1,196,917	1,209,375	1,221,681	1,233,695
Kabupaten Boyolali	931,950	941,624	928,164	932,698	938,469	943,978	932,193	938,999	945,534	951,817	957,857
Kabupaten Klaten	1,127,747	1,139,218	1,126,165	1,128,852	1,133,012	1,136,829	1,131,913	1,137,909	1,143,633	1,148,994	1,154,040
Kabupaten Sukoharjo	820,685	838,149	813,657	819,621	826,699	833,575	825,887	833,933	841,771	849,506	856,937
Kabupaten Wonogiri	1,007,435	1,010,456	978,808	980,132	982,730	985,024	930,422	934,689	938,641	942,377	945,817
Kabupaten Karanganyar	820,432	834,265	799,595	805,462	812,423	819,186	814,907	823,486	831,916	840,171	848,255
Kabupaten Sragen	863,046	868,036	856,296	857,844	860,509	862,910	859,716	864,029	868,105	871,989	875,600
Kabupaten Grobogan	1,314,280	1,334,380	1,318,286	1,326,414	1,336,322	1,345,879	1,311,009	1,319,775	1,328,197	1,336,304	1,343,960
Kabupaten Blora	832,723	840,729	829,745	831,909	835,160	838,159	831,093	835,781	840,208	844,444	848,369
Kabupaten Rembang	582,111	588,320	570,870	572,879	575,640	578,232	592,492	598,122	603,582	608,903	614,087
Kabupaten Pati	1,197,856	1,213,664	1,165,159	1,167,621	1,171,605	1,175,232	1,193,214	1,201,760	1,210,025	1,218,016	1,225,594
Kabupaten Kudus	745,848	759,267	764,563	774,838	786,269	797,617	779,192	789,939	800,397	810,810	821,136
Kabupaten Jepara	1,053,116	1,077,586	1,058,064	1,073,631	1,090,839	1,107,973	1,100,009	1,117,847	1,135,574	1,153,213	1,170,797

Kabupaten Demak	1,044,978	1,071,487	1,017,884	1,025,388	1,034,286	1,042,932	1,057,821	1,070,278	1,082,472	1,094,472	1,106,328
Kabupaten Semarang	885,500	894,018	890,898	900,420	911,223	921,865	933,009	946,784	960,477	974,092	987,557
Kabupaten Temanggung	704,820	717,486	694,949	700,845	707,707	714,411	709,979	717,472	724,810	731,911	738,915
Kabupaten Kendal	887,091	897,560	925,620	938,115	952,011	965,808	902,007	910,518	918,763	926,812	934,643
Kabupaten Batang	701,277	712,542	676,152	678,909	682,561	686,016	708,193	715,494	722,634	729,616	736,397
Kabupaten Pekalongan	842,122	858,650	837,906	844,228	851,700	858,967	840,199	847,379	854,287	861,082	867,573
Kabupaten Pemalang	1,339,112	1,371,943	1,344,597	1,358,952	1,375,240	1,391,284	1,263,271	1,269,077	1,274,475	1,279,596	1,284,236
Kabupaten Tegal	1,446,284	1,471,043	1,406,796	1,410,290	1,415,625	1,420,532	1,396,982	1,403,425	1,409,406	1,415,009	1,420,132
Kabupaten Brebes	1,784,094	1,814,274	1,765,564	1,775,939	1,788,687	1,800,958	1,736,526	1,746,529	1,756,196	1,764,648	1,773,379
Kota Magelang	123,576	130,732	129,952	132,177	134,615	137,055	118,413	118,957	119,523	119,935	120,373
Kota Surakarta	505,153	534,540	512,898	517,557	522,935	528,202	500,173	502,866	505,413	507,825	510,077
Kota Salatiga	164,979	175,967	171,248	174,699	178,451	182,226	170,801	173,402	176,031	178,594	181,193
Kota Semarang	1,406,233	1,435,800	1,468,292	1,488,645	1,511,236	1,533,686	1,560,167	1,588,408	1,616,596	1,644,800	1,672,999
Kota Pekalongan	273,633	284,112	271,808	273,342	275,241	277,065	281,991	285,026	287,978	290,870	293,704
Kota Tegal	240,784	249,612	239,038	239,860	240,502	241,070	240,020	241,402	242,605	243,860	244,998

Data Penelitian PDRB Wilayah Jawa Tengah (juta rupiah)

	4,648,350.18	5,200,371.82	6,033,083.05	6,717,815.82	7,705,219.45	8,386,572.24	9,385,510.68	10,456,446.85	23,325,037.61	25,861,052.33	28,417,093.68
Kabupaten Kudus	16,504,028.86	19,822,794.34	21,429,330.70	24,013,158.42	27,245,329.30	28,946,886.48	31,463,364.03	33,848,937.32	61,478,329.66	68,256,023.66	75,494,060.74
Kabupaten Jepara	4,383,716.46	5,018,164.15	5,677,316.95	6,468,910.32	7,455,878.01	8,206,221.97	9,118,487.15	10,119,549.88	16,373,419.15	17,985,797.30	19,948,286.01
Kabupaten Demak	3,149,386.40	3,532,942.95	3,977,180.32	4,337,087.88	4,931,378.39	5,334,222.61	5,932,795.43	6,517,206.95	14,203,562.06	15,525,369.24	17,116,938.70
Kabupaten Semarang	5,683,406.80	6,484,472.47	7,340,034.64	8,175,899.23	9,284,507.64	10,069,045.33	11,071,609.32	12,335,446.51	27,023,981.68	29,892,402.11	33,482,967.00
Kabupaten Temanggung	2,541,689.78	2,816,682.42	3,210,684.17	3,645,351.52	4,125,938.98	4,502,652.25	5,069,020.30	5,603,983.71	11,837,494.84	13,112,236.62	14,697,636.49
Kabupaten Kendal	5,505,722.11	6,062,143.00	6,913,713.83	7,705,181.53	8,675,477.98	9,555,940.73	10,778,661.34	12,130,057.82	23,012,029.25	25,130,622.48	27,653,091.40
Kabupaten Batang	2,660,659.52	3,110,086.52	3,503,532.45	3,878,725.22	4,356,752.72	4,685,020.77	5,268,572.82	5,864,995.46	11,684,587.71	12,874,152.35	14,381,550.94
Kabupaten Pekalongan	3,361,348.34	3,990,049.28	4,568,471.00	5,094,295.61	5,864,346.61	6,436,183.01	7,230,832.36	8,033,444.43	12,505,826.24	13,757,451.31	15,273,356.18
Kabupaten Pemalang	3,703,314.77	4,506,646.76	5,178,579.01	5,776,983.88	6,575,979.10	7,170,678.83	7,961,378.41	8,859,721.50	13,633,672.54	15,024,076.22	16,698,233.28
Kabupaten Tegal	3,421,779.18	3,836,595.41	4,418,701.80	5,535,534.32	6,406,970.01	7,129,479.47	7,936,028.74	8,798,459.34	18,756,760.13	20,765,592.21	22,916,470.94
Kabupaten Brebes	5,986,162.75	7,325,401.19	8,402,057.26	9,550,916.48	11,134,037.66	12,532,516.70	14,629,929.68	16,426,881.40	24,668,258.21	27,450,195.61	30,739,780.32
Kota Magelang	5,145,458.89	1,288,556.23	1,359,997.00	1,478,242.77	1,679,040.98	1,862,811.29	2,105,226.13	2,323,478.16	4,887,646.47	5,356,307.45	5,915,830.85
Kota Surakarta	4,756,559.52	5,585,776.86	6,190,112.55	6,909,094.57	7,901,886.06	8,880,691.19	9,941,136.57	10,992,971.19	26,425,273.02	29,092,454.16	32,038,668.79
Kota Salatiga	983,258.05	1,104,131.85	1,237,905.22	1,370,166.64	1,541,682.44	1,660,786.91	1,849,275.56	2,029,266.37	7,295,224.40	7,954,195.87	8,799,094.72
Kota Semarang	20,304,595.45	23,208,224.89	26,624,244.18	30,515,736.72	35,024,522.87	38,465,017.28	43,398,190.77	48,461,410.41	99,753,672.36	108,783,394.43	121,262,902.12
Kota Pekalongan	2,053,516.21	2,400,562.15	2,727,184.42	2,993,816.01	3,224,619.35	3,476,699.38	3,803,989.63	4,191,357.50	5,741,728.08	6,396,422.00	7,092,776.58
Kota Tegal	127,884.13	1,450,041.15	1,660,905.62	1,870,352.12	2,139,214.57	2,387,809.68	2,635,244.11	2,846,975.05	8,371,206.01	9,119,587.64	10,039,191.77
JUMLAH	165,476,312.07	190,060,941.23	216,718,457.34	243,698,496.41	283,317,677.50	307,594,331.11	344,442,366.48	381,919,667.39	748,463,084.49	825,440,599.49	912,977,765.74

Data Penelitian Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Jawa Tengah (jiwa)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINSI JAWA TENGAH	6843.8	6533.5	7100.6	6557	6122.6	5655.41	5217.2	5256	4863.5	4811.3	4561.82
Kabupaten Cilacap	346.2	361	402.1	363.6	343.9	318.75	297.2	282	260.9	255.7	239.8
Kabupaten Banyumas	325.2	326.8	362.2	333	340.6	319.85	314.1	328.5	303.9	296.8	283.5
Kabupaten Purbalingga	266.5	250.6	262.9	246.3	221.9	205.01	208.9	196	181.3	181.1	176
Kabupaten Banjarnegara	240.3	239.5	251.3	232.9	200.6	184.02	166.7	177.3	164	166.8	159.5
Kabupaten Kebumen	371.5	349.3	388.7	362.4	334.9	309.61	263	279.4	258.5	251.1	242.3
Kabupaten Purworejo	167.1	157.1	162.3	146	130	121.39	115.3	121.9	112.8	109	102.1
Kabupaten Wonosobo	254.7	239.4	257.5	241.4	207.5	194.02	174.7	183	169.3	170.1	165.8
Kabupaten Magelang	185.8	174.7	199.1	200.1	190.8	176.49	167.2	179.6	166.2	171	160.5
Kabupaten Boyolali	172.3	162	184.6	167	158.4	148.24	127.8	139.5	129.1	126.5	118.6
Kabupaten Klaten	263.9	248.1	257.4	249.1	243.1	220.18	197.4	203.1	187.9	179.5	168.2
Kabupaten Sukoharjo	118.1	111	126.5	113.8	99.1	94.45	90.2	92	85.1	84.1	78.9
Kabupaten Wonogiri	246.1	246.8	262.9	237.4	201.1	184.88	145.5	146.4	135.4	132.2	123.8
Kabupaten Karanganyar	132.6	130.4	148.6	138.9	125.9	118.79	113.8	124.5	115.2	114.4	107.3
Kabupaten Sragen	225.1	204.2	201.9	180.7	177.1	167.3	149.7	154.3	142.8	139	130.3
Kabupaten Grobogan	385.1	362.1	361.9	330.4	262	247.47	233.7	227.8	210.8	199	186.5
Kabupaten Blora	191.2	177.1	197.6	176.8	155.1	145.95	134.9	134.9	124.8	123.8	116
Kabupaten Rembang	186.3	175.1	188.5	174.3	154.7	147.15	138.5	140.4	129.9	128	120
Kabupaten Pati	247.9	233	256.5	228.8	207.2	184.05	172.4	175.1	162	157.9	148.1
Kabupaten Kudus	85.5	80.4	91.6	82.4	97.8	84.86	70.2	73.6	68.1	70.1	65.8
Kabupaten Jepara	104	108.5	123.6	111.2	119.2	104.74	111.8	113.3	104.8	106.9	100.5

Kabupaten Demak	260.6	245	263.5	238.9	217.2	202.24	198.8	192.5	178.1	172.5	162
Kabupaten Semarang	121.3	114	120.7	110.1	102.5	96.72	97.9	96	88.8	83.2	79.8
Kabupaten Temanggung	107.2	100.8	114.9	115	114.7	105.83	95.3	94.9	87.8	91.1	85.5
Kabupaten Kendal	185.5	174.4	198.7	192.7	168.2	152.43	130.4	128.6	119	117.7	110.5
Kabupaten Batang	133.3	125.3	134.4	139.8	122	112.17	103.6	95.3	88.2	87.5	82.1
Kabupaten Pekalongan	181.1	170.3	190	170	164.3	151.63	136.6	125.9	116.5	116.5	109.3
Kabupaten Pemalang	299.1	300.2	338.2	307.1	325.2	303.73	251.8	261.2	241.7	246.8	237
Kabupaten Tegal	297.2	279.4	289.7	258.6	220.7	195.46	182.5	161.1	149	149.8	140.3
Kabupaten Brebes	519.6	488.6	533.1	492.2	459.3	432.4	398.7	394.4	364.9	367.9	355.1
Kota Magelang	17.4	16.4	14.5	13	14.9	13.65	12.4	13.1	12.1	11.8	11
Kota Surakarta	69.5	69.1	77.6	69.8	83.4	77.97	69.8	64.5	59.7	59.7	55.9
Kota Salatiga	16	15	15.2	15.6	14.9	14.05	14.2	13.3	12.3	11.5	10.8
Kota Semarang	79	58.7	77.8	77.6	89.6	73.14	79.7	88.5	81.9	86.7	84.7
Kota Pekalongan	18.6	17.5	19.9	17.9	28	23.34	26.4	28.3	26.8	24.1	23.6
Kota Tegal	23.1	21.7	24.7	22.2	26.8	23.43	25.7	25.9	24	21.6	20.9

Data Penelitian Gini Rasio Wilayah Jawa Tengah

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	0.25	0.28	0.27	0.25	0.30	0.32	0.34	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38
Kabupaten Cilacap	0.23	0.29	0.26	0.27	0.24	0.27	0.25	0.30	0.32	0.37	0.34	0.34
Kabupaten Banyumas	0.28	0.25	0.29	0.25	0.35	0.32	0.34	0.35	0.34	0.36	0.32	0.32
Kabupaten Purbalingga	0.25	0.27	0.29	0.27	0.24	0.27	0.24	0.28	0.33	0.32	0.30	0.30
Kabupaten Banjarnegara	0.21	0.26	0.22	0.27	0.29	0.26	0.26	0.36	0.33	0.39	0.34	0.34
Kabupaten Kebumen	0.19	0.23	0.24	0.24	0.27	0.24	0.23	0.34	0.35	0.31	0.28	0.28
Kabupaten Purworejo	0.24	0.28	0.27	0.23	0.27	0.29	0.29	0.36	0.31	0.34	0.38	0.38
Kabupaten Wonosobo	0.25	0.27	0.24	0.22	0.29	0.24	0.25	0.35	0.38	0.34	0.35	0.35
Kabupaten Magelang	0.21	0.30	0.25	0.27	0.30	0.26	0.25	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34
Kabupaten Boyolali	0.22	0.28	0.26	0.16	0.28	0.26	0.27	0.36	0.38	0.40	0.30	0.30
Kabupaten Klaten	0.25	0.29	0.23	0.20	0.31	0.23	0.25	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36
Kabupaten Sukoharjo	0.23	0.27	0.21	0.17	0.24	0.25	0.30	0.33	0.35	0.34	0.35	0.35
Kabupaten Wonogiri	0.24	0.26	0.24	0.25	0.27	0.29	0.29	0.35	0.32	0.34	0.33	0.33
Kabupaten Karanganyar	0.24	0.27	0.26	0.17	0.29	0.31	0.29	0.37	0.40	0.33	0.36	0.36
Kabupaten Sragen	0.22	0.26	0.27	0.27	0.27	0.24	0.28	0.35	0.37	0.35	0.33	0.33
Kabupaten Grobogan	0.23	0.22	0.22	0.22	0.26	0.23	0.28	0.32	0.35	0.34	0.34	0.34
Kabupaten Blora	0.20	0.25	0.26	0.27	0.32	0.25	0.26	0.33	0.38	0.41	0.39	0.39
Kabupaten Rembang	0.19	0.20	0.20	0.20	0.31	0.21	0.19	0.27	0.33	0.32	0.33	0.33
Kabupaten Pati	0.19	0.21	0.19	0.21	0.29	0.26	0.24	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31
Kabupaten Kudus	0.18	0.20	0.18	0.24	0.22	0.25	0.24	0.35	0.34	0.34	0.37	0.37
Kabupaten Jepara	0.21	0.21	0.20	0.23	0.27	0.22	0.20	0.32	0.35	0.33	0.31	0.31
Kabupaten Demak	0.24	0.30	0.27	0.24	0.24	0.22	0.24	0.31	0.34	0.33	0.32	0.32
Kabupaten Semarang	0.24	0.24	0.28	0.19	0.27	0.26	0.28	0.33	0.36	0.31	0.31	0.31
Kabupaten Temanggung	0.26	0.28	0.33	0.24	0.25	0.27	0.28	0.38	0.35	0.34	0.38	0.38
Kabupaten Kendal	0.22	0.27	0.25	0.19	0.25	0.28	0.27	0.37	0.36	0.32	0.34	0.34
Kabupaten Batang	0.25	0.26	0.23	0.16	0.25	0.27	0.28	0.28	0.31	0.30	0.29	0.29
Kabupaten Pekalongan	0.21	0.23	0.24	0.22	0.25	0.20	0.23	0.28	0.28	0.27	0.29	0.29
Kabupaten Pemalang	0.23	0.23	0.24	0.22	0.21	0.22	0.20	0.26	0.25	0.24	0.28	0.28
Kabupaten Tegal	0.27	0.26	0.21	0.19	0.25	0.27	0.30	0.28	0.32	0.32	0.33	0.33
Kabupaten Brebes	0.21	0.27	0.22	0.21	0.26	0.23	0.23	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32
Kota Magelang	0.29	0.28	0.25	0.27	0.26	0.28	0.31	0.34	0.37	0.33	0.36	0.36
Kota Surakarta	0.29	0.28	0.29	0.21	0.27	0.27	0.34	0.33	0.37	0.35	0.36	0.36
Kota Salatiga	0.28	0.29	0.29	0.30	0.32	0.29	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35
Kota Semarang	0.24	0.25	0.29	0.30	0.26	0.37	0.32	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31
Kota Pekalongan	0.19	0.27	0.24	0.28	0.25	0.25	0.28	0.31	0.33	0.32	0.34	0.34
Kota Tegal	0.23	0.23	0.24	0.23	0.28	0.24	0.24	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31

Data Penelitian Regresi Data Panel Kemiskinan

Kabupaten_Kota	Tahun	JPM	PDRB	GINI
Kab. Cilacap	2004	346200	14216236.60	0.23
Kab. Cilacap	2005	361000	19151057.28	0.29
Kab. Cilacap	2006	402100	23034934.91	0.26
Kab. Cilacap	2007	363600	25452312.00	0.27
Kab. Cilacap	2008	343900	34338836.31	0.24
Kab. Cilacap	2009	318750	34630882.44	0.27
Kab. Cilacap	2010	297200	39460153.36	0.25
Kab. Cilacap	2011	282000	44904175.78	0.30
Kab. Cilacap	2012	260900	77450056.10	0.32
Kab. Cilacap	2013	255700	87003565.52	0.37
Kab. Cilacap	2014	239800	92510348.76	0.34
Kab. Banyumas	2004	325200	4835240.50	0.28
Kab. Banyumas	2005	326800	5580804.33	0.25
Kab. Banyumas	2006	362200	6428219.55	0.29
Kab. Banyumas	2007	333000	7268199.71	0.25
Kab. Banyumas	2008	340600	8347681.70	0.35
Kab. Banyumas	2009	319850	9189718.17	0.32
Kab. Banyumas	2010	314100	10335939.04	0.34
Kab. Banyumas	2011	328500	11354318.36	0.35
Kab. Banyumas	2012	303900	28486842.81	0.34
Kab. Banyumas	2013	296800	31307180.25	0.36
Kab. Banyumas	2014	283500	34420367.01	0.32
Kab. Purbalingga	2004	266500	2564077.56	0.25

Kab. Purbalingga	2005	250600	2912447.31	0.27
Kab. Purbalingga	2006	262900	3408083.52	0.29
Kab. Purbalingga	2007	246300	3887240.54	0.27
Kab. Purbalingga	2008	221900	4444058.18	0.24
Kab. Purbalingga	2009	205010	5161810.20	0.27
Kab. Purbalingga	2010	208900	5770135.41	0.24
Kab. Purbalingga	2011	196000	6515649.54	0.28
Kab. Purbalingga	2012	181300	12700951.32	0.33
Kab. Purbalingga	2013	181100	14169966.63	0.32
Kab. Purbalingga	2014	176000	15946676.63	0.30
Kab. Banjarnegara	2004	240300	3216818.03	0.21
Kab. Banjarnegara	2005	239500	3719943.76	0.26
Kab. Banjarnegara	2006	251300	4157574.64	0.22
Kab. Banjarnegara	2007	232900	4706344.95	0.27
Kab. Banjarnegara	2008	200600	5526574.99	0.29
Kab. Banjarnegara	2009	184020	6023881.54	0.26
Kab. Banjarnegara	2010	166700	6701471.72	0.26
Kab. Banjarnegara	2011	177300	7445540.44	0.36
Kab. Banjarnegara	2012	164000	11533728.14	0.33
Kab. Banjarnegara	2013	166800	12715742.44	0.39
Kab. Banjarnegara	2014	159500	14392017.75	0.34
Kab. Kebumen	2004	371500	3060653.43	0.19
Kab. Kebumen	2005	349300	3502841.33	0.23
Kab. Kebumen	2006	388700	4082249.01	0.24
Kab. Kebumen	2007	362400	4568870.87	0.24
Kab. Kebumen	2008	334900	5305934.01	0.27

Kab. Kebumen	2009	309610	5855355.62	0.24
Kab. Kebumen	2010	263000	6484243.6	0.23
Kab. Kebumen	2011	279400	7122249.81	0.34
Kab. Kebumen	2012	258500	15123968.96	0.35
Kab. Kebumen	2013	251100	16536357.82	0.31
Kab. Kebumen	2014	242300	18672657.82	0.28
Kab. Purworejo	2004	167100	2951647.48	0.24
Kab. Purworejo	2005	157100	3443170.9	0.28
Kab. Purworejo	2006	162300	4094294.69	0.27
Kab. Purworejo	2007	146000	4660785.05	0.23
Kab. Purworejo	2008	130000	5328179.09	0.27
Kab. Purworejo	2009	121390	5849537.33	0.29
Kab. Purworejo	2010	115300	6466891.29	0.29
Kab. Purworejo	2011	121900	7143081.12	0.36
Kab. Purworejo	2012	112800	10470685.79	0.31
Kab. Purworejo	2013	109000	11477756.61	0.34
Kab. Purworejo	2014	102100	12728015.35	0.38
Kab. Wonosobo	2004	254700	2063216.41	0.25
Kab. Wonosobo	2005	239400	2309638.85	0.27
Kab. Wonosobo	2006	257500	2630137.88	0.24
Kab. Wonosobo	2007	241400	2960850.64	0.22
Kab. Wonosobo	2008	207500	3332061.77	0.29
Kab. Wonosobo	2009	194020	3584212.92	0.24
Kab. Wonosobo	2010	174700	3927280.9	0.25
Kab. Wonosobo	2011	183000	4323254.88	0.35
Kab. Wonosobo	2012	169300	10893446.21	0.38

Kab. Wonosobo	2013	170100	12031337.68	0.34
Kab. Wonosobo	2014	165800	13333270.53	0.35
Kab. Magelang	2004	185800	4119373.21	0.21
Kab. Magelang	2005	174700	4640401.55	0.3
Kab. Magelang	2006	199100	5252845.83	0.25
Kab. Magelang	2007	200100	5895048.24	0.27
Kab. Magelang	2008	190800	6587626.47	0.3
Kab. Magelang	2009	176490	7151057.51	0.26
Kab. Magelang	2010	167200	8022322.5	0.25
Kab. Magelang	2011	179600	8770808.7	0.32
Kab. Magelang	2012	166200	17731492.11	0.33
Kab. Magelang	2013	171000	19672797.89	0.34
Kab. Magelang	2014	160500	21841313.96	0.34
Kab. Boyolali	2004	172300	4250098.73	0.22
Kab. Boyolali	2005	162000	4639506.25	0.28
Kab. Boyolali	2006	184600	5142433.03	0.26
Kab. Boyolali	2007	167000	5708063.97	0.16
Kab. Boyolali	2008	158400	6446546.37	0.28
Kab. Boyolali	2009	148240	7142868.31	0.26
Kab. Boyolali	2010	127800	8101684.49	0.27
Kab. Boyolali	2011	139500	9028333.47	0.36
Kab. Boyolali	2012	129100	16980607.95	0.38
Kab. Boyolali	2013	126500	18798639.48	0.4
Kab. Boyolali	2014	118600	20958573.97	0.3
Kab. Klaten	2004	263900	5475849.75	0.25
Kab. Klaten	2005	248100	6520828.29	0.29

Kab. Klaten	2006	257400	7504499.43	0.23
Kab. Klaten	2007	249100	8349253.36	0.2
Kab. Klaten	2008	243100	9491601.49	0.31
Kab. Klaten	2009	220180	10358526.02	0.23
Kab. Klaten	2010	197400	11272386.97	0.25
Kab. Klaten	2011	203100	12186800.75	0.32
Kab. Klaten	2012	187900	21348291.96	0.33
Kab. Klaten	2013	179500	23349880.45	0.34
Kab. Klaten	2014	168200	26110764.38	0.36
Kab. Sukoharjo	2004	118100	4806448.25	0.23
Kab. Sukoharjo	2005	111000	5545486.86	0.27
Kab. Sukoharjo	2006	126500	6277623.81	0.21
Kab. Sukoharjo	2007	113800	7054172.76	0.17
Kab. Sukoharjo	2008	99100	8041276.35	0.24
Kab. Sukoharjo	2009	94450	8920761.89	0.25
Kab. Sukoharjo	2010	90200	9911509.17	0.3
Kab. Sukoharjo	2011	92000	11004550.24	0.33
Kab. Sukoharjo	2012	85100	20228720.41	0.35
Kab. Sukoharjo	2013	84100	22029889.84	0.34
Kab. Sukoharjo	2014	78900	24260290.49	0.35
Kab. Wonogiri	2004	246100	3129184.54	0.24
Kab. Wonogiri	2005	246800	3454287.16	0.26
Kab. Wonogiri	2006	262900	4040531.58	0.24
Kab. Wonogiri	2007	237400	4551726.35	0.25
Kab. Wonogiri	2008	201100	5268669.5	0.27
Kab. Wonogiri	2009	184880	5734448.11	0.29

Kab. Wonogiri	2010	145500	6734273.01	0.29
Kab. Wonogiri	2011	146400	7189374.13	0.35
Kab. Wonogiri	2012	135400	16024057.09	0.32
Kab. Wonogiri	2013	132200	17657525.95	0.34
Kab. Wonogiri	2014	123800	19674351.24	0.33
Kab. Karanganyar	2004	132600	5038378.68	0.24
Kab. Karanganyar	2005	130400	5611289.49	0.27
Kab. Karanganyar	2006	148600	6187781.85	0.26
Kab. Karanganyar	2007	138900	6904990.47	0.17
Kab. Karanganyar	2008	125900	7679675.36	0.29
Kab. Karanganyar	2009	118790	8378315.88	0.31
Kab. Karanganyar	2010	113800	9224224.85	0.29
Kab. Karanganyar	2011	124500	10287905.32	0.37
Kab. Karanganyar	2012	115200	20798594.46	0.4
Kab. Karanganyar	2013	114400	22880345.39	0.33
Kab. Karanganyar	2014	107300	25645061.65	0.36
Kab. Sragen	2004	225100	3059653.16	0.22
Kab. Sragen	2005	204200	3497324.94	0.26
Kab. Sragen	2006	201900	4042561.37	0.27
Kab. Sragen	2007	180700	4512215.73	0.27
Kab. Sragen	2008	177100	5170914.12	0.27
Kab. Sragen	2009	167300	5871144.81	0.24
Kab. Sragen	2010	149700	6695256.97	0.28
Kab. Sragen	2011	154300	7579678.26	0.35
Kab. Sragen	2012	142800	19887564.98	0.37
Kab. Sragen	2013	139000	21870689.03	0.35

Kab. Sragen	2014	130300	24488922.71	0.33
Kab. Grobogan	2004	385100	3160711.85	0.23
Kab. Grobogan	2005	362100	3560401.73	0.22
Kab. Grobogan	2006	361900	4019497.49	0.22
Kab. Grobogan	2007	330400	4558277.12	0.22
Kab. Grobogan	2008	262000	5185205.33	0.26
Kab. Grobogan	2009	247470	5764639.16	0.23
Kab. Grobogan	2010	233700	6499594.27	0.28
Kab. Grobogan	2011	227800	7141461.62	0.32
Kab. Grobogan	2012	210800	15217430.31	0.35
Kab. Grobogan	2013	199000	16621487.57	0.34
Kab. Grobogan	2014	186500	18164846.24	0.34
Kab. Blora	2004	191200	2182867.87	0.2
Kab. Blora	2005	177100	2456884.88	0.25
Kab. Blora	2006	197600	2747560.63	0.26
Kab. Blora	2007	176800	3016407.19	0.27
Kab. Blora	2008	155100	3485816.42	0.32
Kab. Blora	2009	145950	3833453.72	0.25
Kab. Blora	2010	134900	4285966.96	0.26
Kab. Blora	2011	134900	4641725.68	0.33
Kab. Blora	2012	124800	12285562.55	0.38
Kab. Blora	2013	123800	13544646.54	0.41
Kab. Blora	2014	116000	15055175.26	0.39
Kab. Rembang	2004	186300	2425018.62	0.19
Kab. Rembang	2005	175100	2770982.88	0.2
Kab. Rembang	2006	188500	3214593.95	0.2

Kab. Rembang	2007	174300	3606468.4	0.2
Kab. Rembang	2008	154700	4064237.92	0.31
Kab. Rembang	2009	147150	4454481.36	0.21
Kab. Rembang	2010	138500	4969778.94	0.19
Kab. Rembang	2011	140400	5440169.44	0.27
Kab. Rembang	2012	129900	10323373.92	0.33
Kab. Rembang	2013	128000	11435457.41	0.32
Kab. Rembang	2014	120000	12807181.48	0.33
Kab. Pati	2004	247900	4648350.18	0.19
Kab. Pati	2005	233000	5200371.82	0.21
Kab. Pati	2006	256500	6033083.05	0.19
Kab. Pati	2007	228800	6717815.82	0.21
Kab. Pati	2008	207200	7705219.45	0.29
Kab. Pati	2009	184050	8386572.24	0.26
Kab. Pati	2010	172400	9385510.68	0.24
Kab. Pati	2011	175100	10456446.85	0.29
Kab. Pati	2012	162000	23325037.61	0.29
Kab. Pati	2013	157900	25861052.33	0.3
Kab. Pati	2014	148100	28417093.68	0.31
Kab. Kudus	2004	85500	16504028.86	0.18
Kab. Kudus	2005	80400	19822794.34	0.2
Kab. Kudus	2006	91600	21429330.7	0.18
Kab. Kudus	2007	82400	24013158.42	0.24
Kab. Kudus	2008	97800	27245329.3	0.22
Kab. Kudus	2009	84860	28946886.48	0.25
Kab. Kudus	2010	70200	31463364.03	0.24

Kab. Kudus	2011	73600	33848937.32	0.35
Kab. Kudus	2012	68100	61478329.66	0.34
Kab. Kudus	2013	70100	68256023.66	0.34
Kab. Kudus	2014	65800	75494060.74	0.37
Kab. Jepara	2004	104000	4383716.46	0.21
Kab. Jepara	2005	108500	5018164.15	0.21
Kab. Jepara	2006	123600	5677316.95	0.2
Kab. Jepara	2007	111200	6468910.32	0.23
Kab. Jepara	2008	119200	7455878.01	0.27
Kab. Jepara	2009	104740	8206221.97	0.22
Kab. Jepara	2010	111800	9118487.15	0.2
Kab. Jepara	2011	113300	10119549.88	0.32
Kab. Jepara	2012	104800	16373419.15	0.35
Kab. Jepara	2013	106900	17985797.3	0.33
Kab. Jepara	2014	100500	19948286.01	0.31
Kab. Demak	2004	260600	3149386.4	0.24
Kab. Demak	2005	245000	3532942.95	0.3
Kab. Demak	2006	263500	3977180.32	0.27
Kab. Demak	2007	238900	4337087.88	0.24
Kab. Demak	2008	217200	4931378.39	0.24
Kab. Demak	2009	202240	5334222.61	0.22
Kab. Demak	2010	198800	5932795.43	0.24
Kab. Demak	2011	192500	6517206.95	0.31
Kab. Demak	2012	178100	14203562.06	0.34
Kab. Demak	2013	172500	15525369.24	0.33
Kab. Demak	2014	162000	17116938.7	0.32

Kab. Semarang	2004	121300	5683406.8	0.24
Kab. Semarang	2005	114000	6484472.47	0.24
Kab. Semarang	2006	120700	7340034.64	0.28
Kab. Semarang	2007	110100	8175899.23	0.19
Kab. Semarang	2008	102500	9284507.64	0.27
Kab. Semarang	2009	96720	10069045.33	0.26
Kab. Semarang	2010	97900	11071609.32	0.28
Kab. Semarang	2011	96000	12335446.51	0.33
Kab. Semarang	2012	88800	27023981.68	0.36
Kab. Semarang	2013	83200	29892402.11	0.31
Kab. Semarang	2014	79800	33482967	0.31
Kab. Temanggung	2004	107200	2541689.78	0.26
Kab. Temanggung	2005	100800	2816682.42	0.28
Kab. Temanggung	2006	114900	3210684.17	0.33
Kab. Temanggung	2007	115000	3645351.52	0.24
Kab. Temanggung	2008	114700	4125938.98	0.25
Kab. Temanggung	2009	105830	4502652.25	0.27
Kab. Temanggung	2010	95300	5069020.3	0.28
Kab. Temanggung	2011	94900	5603983.71	0.38
Kab. Temanggung	2012	87800	11837494.84	0.35
Kab. Temanggung	2013	91100	13112236.62	0.34
Kab. Temanggung	2014	85500	14697636.49	0.38
Kab. Kendal	2004	185500	5505722.11	0.22
Kab. Kendal	2005	174400	6062143	0.27
Kab. Kendal	2006	198700	6913713.83	0.25
Kab. Kendal	2007	192700	7705181.53	0.19

Kab. Kendal	2008	168200	8675477.98	0.25
Kab. Kendal	2009	152430	9555940.73	0.28
Kab. Kendal	2010	130400	10778661.34	0.27
Kab. Kendal	2011	128600	12130057.82	0.37
Kab. Kendal	2012	119000	23012029.25	0.36
Kab. Kendal	2013	117700	25130622.48	0.32
Kab. Kendal	2014	110500	27653091.4	0.34
Kab. Batang	2004	133300	2660659.52	0.25
Kab. Batang	2005	125300	3110086.52	0.26
Kab. Batang	2006	134400	3503532.45	0.23
Kab. Batang	2007	139800	3878725.22	0.16
Kab. Batang	2008	122000	4356752.72	0.25
Kab. Batang	2009	112170	4685020.77	0.27
Kab. Batang	2010	103600	5268572.82	0.28
Kab. Batang	2011	95300	5864995.46	0.28
Kab. Batang	2012	88200	11684587.71	0.31
Kab. Batang	2013	87500	12874152.35	0.3
Kab. Batang	2014	82100	14381550.94	0.29
Kab. Pekalongan	2004	181100	3361348.34	0.21
Kab. Pekalongan	2005	170300	3990049.28	0.23
Kab. Pekalongan	2006	190000	4568471	0.24
Kab. Pekalongan	2007	170000	5094295.61	0.22
Kab. Pekalongan	2008	164300	5864346.61	0.25
Kab. Pekalongan	2009	151630	6436183.01	0.2
Kab. Pekalongan	2010	136600	7230832.36	0.23
Kab. Pekalongan	2011	125900	8033444.43	0.28

Kab. Pekalongan	2012	116500	12505826.24	0.28
Kab. Pekalongan	2013	116500	13757451.31	0.27
Kab. Pekalongan	2014	109300	15273356.18	0.29
Kab. Pemalang	2004	299100	3703314.77	0.23
Kab. Pemalang	2005	300200	4506646.76	0.23
Kab. Pemalang	2006	338200	5178579.01	0.24
Kab. Pemalang	2007	307100	5776983.88	0.22
Kab. Pemalang	2008	325200	6575979.1	0.21
Kab. Pemalang	2009	303730	7170678.83	0.22
Kab. Pemalang	2010	251800	7961378.41	0.2
Kab. Pemalang	2011	261200	8859721.5	0.26
Kab. Pemalang	2012	241700	13633672.54	0.25
Kab. Pemalang	2013	246800	15024076.22	0.24
Kab. Pemalang	2014	237000	16698233.28	0.28
Kab.Tegal	2004	297200	3421779.18	0.27
Kab.Tegal	2005	279400	3836595.41	0.26
Kab.Tegal	2006	289700	4418701.8	0.21
Kab.Tegal	2007	258600	5535534.32	0.19
Kab.Tegal	2008	220700	6406970.01	0.25
Kab.Tegal	2009	195460	7129479.47	0.27
Kab.Tegal	2010	182500	7936028.74	0.3
Kab.Tegal	2011	161100	8798459.34	0.28
Kab.Tegal	2012	149000	18756760.13	0.32
Kab.Tegal	2013	149800	20765592.21	0.32
Kab.Tegal	2014	140300	22916470.94	0.33
Kab. Brebes	2004	519600	5986162.75	0.21

Kab. Brebes	2005	488600	7325401.19	0.27
Kab. Brebes	2006	533100	8402057.26	0.22
Kab. Brebes	2007	492200	9550916.48	0.21
Kab. Brebes	2008	459300	11134037.66	0.26
Kab. Brebes	2009	432400	12532516.7	0.23
Kab. Brebes	2010	398700	14629929.68	0.23
Kab. Brebes	2011	394400	16426881.4	0.33
Kab. Brebes	2012	364900	24668258.21	0.32
Kab. Brebes	2013	367900	27450195.61	0.31
Kab. Brebes	2014	355100	30739780.32	0.32
Kota Magelang	2004	17400	5145458.89	0.29
Kota Magelang	2005	16400	1288556.23	0.28
Kota Magelang	2006	14500	1359997	0.25
Kota Magelang	2007	13000	1478242.77	0.27
Kota Magelang	2008	14900	1679040.98	0.26
Kota Magelang	2009	13650	1862811.29	0.28
Kota Magelang	2010	12400	2105226.13	0.31
Kota Magelang	2011	13100	2323478.16	0.34
Kota Magelang	2012	12100	4887646.47	0.37
Kota Magelang	2013	11800	5356307.45	0.33
Kota Magelang	2014	11000	5915830.85	0.36
Kota Surakarta	2004	69500	4756559.52	0.29
Kota Surakarta	2005	69100	5585776.86	0.28
Kota Surakarta	2006	77600	6190112.55	0.29
Kota Surakarta	2007	69800	6909094.57	0.21
Kota Surakarta	2008	83400	7901886.06	0.27

Kota Surakarta	2009	77970	8880691.19	0.27
Kota Surakarta	2010	69800	9941136.57	0.34
Kota Surakarta	2011	64500	10992971.19	0.33
Kota Surakarta	2012	59700	26425273.02	0.37
Kota Surakarta	2013	59700	29092454.16	0.35
Kota Surakarta	2014	55900	32038668.79	0.36
Kota Salatiga	2004	16000	983258.05	0.28
Kota Salatiga	2005	15000	1104131.85	0.29
Kota Salatiga	2006	15200	1237905.22	0.29
Kota Salatiga	2007	15600	1370166.64	0.3
Kota Salatiga	2008	14900	1541682.44	0.32
Kota Salatiga	2009	14050	1660786.91	0.29
Kota Salatiga	2010	14200	1849275.56	0.35
Kota Salatiga	2011	13300	2029266.37	0.34
Kota Salatiga	2012	12300	7295224.4	0.35
Kota Salatiga	2013	11500	7954195.87	0.37
Kota Salatiga	2014	10800	8799094.72	0.35
Kota Semarang	2004	79000	20304595.45	0.24
Kota Semarang	2005	58700	23208224.89	0.25
Kota Semarang	2006	77800	26624244.18	0.29
Kota Semarang	2007	77600	30515736.72	0.3
Kota Semarang	2008	89600	35024522.87	0.26
Kota Semarang	2009	73140	38465017.28	0.37
Kota Semarang	2010	79700	43398190.77	0.32
Kota Semarang	2011	88500	48461410.41	0.35
Kota Semarang	2012	81900	99753672.36	0.35

Kota Semarang	2013	86700	108783394.4	0.35
Kota Semarang	2014	84700	121262902.1	0.31
Kota Pekalongan	2004	18600	2053516.21	0.19
Kota Pekalongan	2005	17500	2400562.15	0.27
Kota Pekalongan	2006	19900	2727184.42	0.24
Kota Pekalongan	2007	17900	2993816.01	0.28
Kota Pekalongan	2008	28000	3224619.35	0.25
Kota Pekalongan	2009	23340	3476699.38	0.25
Kota Pekalongan	2010	26400	3803989.63	0.28
Kota Pekalongan	2011	28300	4191357.5	0.31
Kota Pekalongan	2012	26800	5741728.08	0.33
Kota Pekalongan	2013	24100	6396422	0.32
Kota Pekalongan	2014	23600	7092776.58	0.34
Kota Tegal	2004	23100	127884.13	0.23
Kota Tegal	2005	21700	1450041.15	0.23
Kota Tegal	2006	24700	1660905.62	0.24
Kota Tegal	2007	22200	1870352.12	0.23
Kota Tegal	2008	26800	2139214.57	0.28
Kota Tegal	2009	23430	2387809.68	0.24
Kota Tegal	2010	25700	2635244.11	0.24
Kota Tegal	2011	25900	2846975.05	0.32
Kota Tegal	2012	24000	8371206.01	0.33
Kota Tegal	2013	21600	9119587.64	0.32
Kota Tegal	2014	20900	10039191.77	0.31

LAMPIRAN III

UJI SPESIFIKASI MODEL

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Terhadap Jumlah Penduduk

Miskin

1. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: PLS_01
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	142.193055	(34,348)	0.0000
Cross-section Chi-square	1039.828285	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: JPM
Method: Panel Least Squares
Date: 01/22/17 Time: 22:26
Sample: 2004 2014
Periods included: 11
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	321508.8	27846.48	11.54576	0.0000
GINI	-580698.4	102079.8	-5.688668	0.0000
PDRB	0.000571	0.000357	1.600049	0.1104
R-squared	0.078797	Mean dependent var	164994.5	
Adjusted R-squared	0.073973	S.D. dependent var	99971.65	
S.E. of regression	96202.99	Akaike info criterion	25.79407	
Sum squared resid	3.54E+12	Schwarz criterion	25.82487	
Log likelihood	-4962.359	Hannan-Quinn criter.	25.80629	
F-statistic	16.33747	Durbin-Watson stat	0.203426	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: PLS_01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.			Prob.
	Statistic	Chi-Sq. d.f.		
Cross-section random	3.186801	2	0.2032	

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GINI	297448.703	301463.3185	5307108.974	
PDRB	330	87	150	0.0814
	-0.000731	-0.000707	0.000000	0.1539

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: JPM

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/17 Time: 22:26

Sample: 2004 2014

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	257450.8	8585.547	29.98654	0.0000
GINI	-297448.7	33353.64	-8.918028	0.0000
PDRB	-0.000731	0.000159	-4.598704	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.938143	Mean dependent var	164994.5
Adjusted R-squared	0.931744	S.D. dependent var	99971.65
S.E. of regression	26118.48	Akaike info criterion	23.26984
Sum squared resid	2.37E+11	Schwarz criterion	23.64976
Log likelihood	-4442.444	Hannan-Quinn criter.	23.42052
F-statistic	146.6073	Durbin-Watson stat	0.868467
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

HASIL OUTPUT

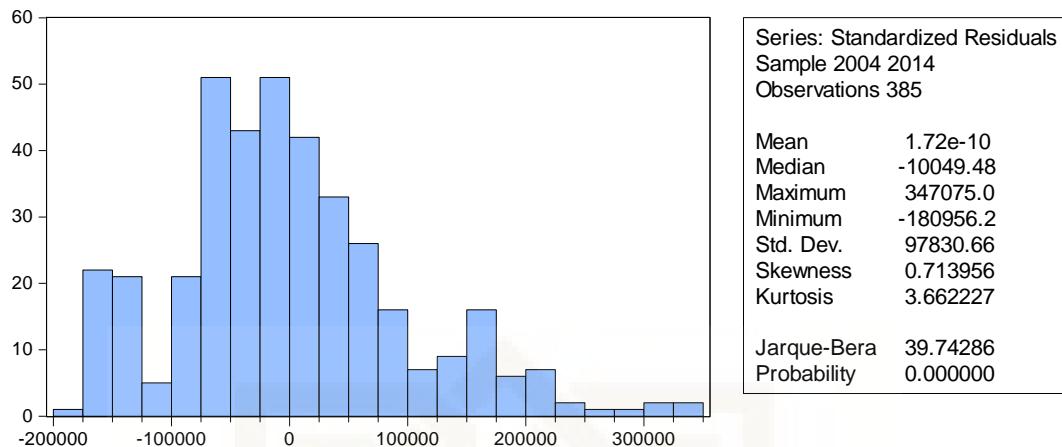
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Terhadap Jumlah Penduduk

Miskin

Dependent Variable: JPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/04/17 Time: 00:59
 Sample: 2004 2014
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 385
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	258285.7	18046.46	14.31227	0.0000
GINI	-301463.3	33273.99	-9.060029	0.0000
PDRB	-0.000707	0.000158	-4.470620	0.0000
<hr/>				
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			93948.75	0.9283
Idiosyncratic random			26118.48	0.0717
<hr/>				
Weighted Statistics				
R-squared	0.353805	Mean dependent var	13781.92	
Adjusted R-squared	0.350422	S.D. dependent var	32456.81	
S.E. of regression	26159.02	Sum squared resid	2.61E+11	
F-statistic	104.5764	Durbin-Watson stat	0.801697	
Prob(F-statistic)	0.000000			
<hr/>				
Unweighted Statistics				
R-squared	0.042373	Mean dependent var	164994.5	
Sum squared resid	3.68E+12	Durbin-Watson stat	0.172322	

Histogram Normality



CURRICULUM VITAE



A. DATA PRIBADI

Nama	: Dian Putri Ardiana
Tempat, Tanggal Lahir	: Gunung kidul, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Gatak Rt 40/ Rw 17, Ngawonggo, Ceper, Klaten Jawa Tengah (57465)
Contact Person	: 0857-2870-2368
E-mail	: putriardiana23@gmail.com
Twitter/Line/Ig	: @ardiana_putri96
Facebook	: Dian Putri Ardiana (Puput)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2013/2017	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Program S1 Ekonomi Syariah
2012/2013	: Magistra Utama Surakarta D1 - Akuntansi perusahaan dan perpajakan
2009/2012	: SMK Batur Jaya 2 Ceper Klaten Akuntansi
2006/2009	: SMP N 1 Ceper Klaten
2001/2006	: SD N 2 Lemahireng Pedan Klaten